



## Budaya Patronase di Indonesia: Tinjauan Medan Politik dan Modal Sosial dalam Teori Praktik Sosial Bourdieu

Mangihut Siregar<sup>1\*</sup>, Novita Dwi Indriani<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

[mangihut@uwks.ac.id](mailto:mangihut@uwks.ac.id)<sup>1</sup>, [novitadwiindriani20@gmail.com](mailto:novitadwiindriani20@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [mangihut@uwks.ac.id](mailto:mangihut@uwks.ac.id)

**Abstract.** *The culture of patronage is a key characteristic of Indonesian political dynamics, having developed from the pre-colonial era to the contemporary democratic era. Despite decentralization and political reforms in Indonesia, patronage practices persist through relationships between political elites, bureaucracy, business actors, and communities, particularly at the local level. This study analyzes patronage using Pierre Bourdieu's Social Practice Theory framework, which emphasizes the interaction between habitus, capital, and the arena as factors shaping social practices. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through desk studies, which allows researchers to examine various academic literature to build a comprehensive conceptual analysis. The research findings indicate that internalized political habitus, the accumulation of economic, social, cultural, and symbolic capital, and a competitive local political field are key elements in perpetuating patronage. Patronage is not merely a transactional political practice, but a social structure that is continuously reproduced and impacts the politicization of bureaucracy, the strengthening of oligarchy, power inequality, and the vulnerability of the poor to political manipulation. This research confirms that efforts to strengthen democracy in Indonesia require transformation of the political habitus of society, bureaucratic reform, and restrictions on the dominance of economic actors in the political arena to break the entrenched patron-client chain.*

**Keywords:** Clientelism; Indonesian Democracy; Local Politics; Political Patronage; Social Practices

**Abstrak.** Budaya patronase merupakan salah satu karakter utama dalam dinamika politik Indonesia yang telah terbentuk sejak era pra-kolonial hingga masa demokrasi kontemporer. Meskipun Indonesia telah mengalami desentralisasi dan reformasi politik, praktik patronase tetap bertahan melalui relasi antara elite politik, birokrasi, aktor bisnis, dan masyarakat, terutama di tingkat lokal. Penelitian ini menganalisis patronase dengan menggunakan kerangka Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, yang menekankan interaksi antara habitus, modal, dan arena sebagai faktor pembentuk praktik sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yang memungkinkan peneliti menelaah berbagai literatur akademik untuk membangun analisis konseptual yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa habitus politik yang terinternalisasi, akumulasi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, serta medan politik lokal yang kompetitif menjadi elemen kunci dalam melanggengkan patronase. Patronase tidak sekadar menjadi praktik politik transaksional, tetapi struktur sosial yang terus direproduksi dan berdampak pada politisasi birokrasi, penguatan oligarki, ketimpangan kekuasaan, hingga kerentanan masyarakat miskin terhadap manipulasi politik. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya penguatan demokrasi di Indonesia membutuhkan transformasi habitus politik masyarakat, reformasi birokrasi, serta pembatasan dominasi aktor ekonomi dalam arena politik untuk memutus mata rantai patron-klien yang telah mengakar.

**Kata Kunci:** Demokrasi Indonesia; Klientelisme; Patronase Politik; Politik Lokal; Praktik Sosial

### 1. LATAR BELAKANG

Budaya patronase merupakan salah satu karakteristik paling menonjol dalam dinamika politik Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Segi yang sama, pemahaman mengenai patronase sebagai suatu pembiasaan yang telah ada dari dulu dengan menyerahkan suatu peluang terhadap kerabatnya, keluarganya, orang terdekat, atau orang yang dikenali supaya bisa menjadi pemimpin (Endang et al, 2025). Sementara itu, kondisi patronase dapat dijalankan pada berbagai ranah di antaranya yakni ranah perpolitikan, ranah pendidikan, maupun ranah sosial (Zaenal, et al, 2021).

Sebabnya, Patronase menggambarkan hubungan timbal balik antara aktor politik yang memiliki sumber daya baik material, simbolik, maupun sosial dengan kelompok masyarakat atau aktor lain yang membutuhkan akses terhadap kekuasaan, perlindungan, dan keuntungan politik tertentu. Praktik patronase ini telah menjadi bagian dari struktur politik Indonesia sejak masa kolonial, diperkuat oleh budaya feodalisme lokal, dan terus berkembang dalam konteks demokrasi modern. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai gelombang reformasi dan desentralisasi politik, pola-pola patronase masih mengakar kuat dalam proses elektoral, hubungan elite-massa, dan struktur birokrasi negara.

Dalam kerangka teori praktik sosial Pierre Bourdieu, fenomena patronase dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi kompleks antara habitus, modal, dan arena. Bourdieu menekankan bahwa praktik sosial tidak terjadi secara acak, melainkan hasil dari internalisasi pengalaman historis (habitus), akumulasi sumber daya (modal), serta struktur medan sosial (arena) yang menjadi tempat pertarungan kepentingan. Ketiga konsep ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif untuk menjelaskan mengapa budaya patronase terus bertahan, meskipun berbagai upaya rasionalisasi tata kelola pemerintahan telah dilakukan (Wirawan, 2012).

Dalam konteks medan politik Indonesia, patronase tidak sekadar dipahami sebagai hubungan transaksional, tetapi sebagai praktik sosial yang memproduksi dan mereproduksi kekuasaan (Urfan et al, 2024). Para aktor politik memanfaatkan modal sosial berupa jaringan, loyalitas kelompok, solidaritas primordial, dan kedekatan personal untuk memobilisasi dukungan. Modal ekonomi digunakan untuk mendistribusikan sumber daya, mulai dari bantuan sosial hingga proyek-proyek pembangunan. Sementara modal simbolik berperan dalam memberikan legitimasi, baik melalui status sosial, gelar adat, religiusitas, maupun citra moral yang melekat pada patron. Keseluruhan modal ini dioperasikan dalam arena politik yang penuh kompetisi, sehingga patronase menjadi strategi efektif untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan (Setiawan, 2022).

Desentralisasi pemerintahan Pasca-Reformasi turut memperkuat praktik patronase di tingkat lokal. Kepala daerah, anggota legislatif, maupun elite politik lokal memiliki ruang lebih besar untuk mengelola sumber daya politik dan ekonomi, sehingga pola patron-klien semakin terinstitusionalisasi. Dalam konteks ini, habitus politik masyarakat yang terbentuk dari relasi feodal, ketergantungan ekonomi, serta orientasi pragmatis dalam memilih pemimpin turut mendukung keberlanjutan patronase (Sakti, 2025).

Bourdieu menegaskan bahwa habitus tidak mudah berubah karena ia tertanam dalam pengalaman historis dan struktur sosial masyarakat. Karena itu, patronase tidak hanya

berkembang karena kehendak elite, tetapi juga karena penerimaan masyarakat yang menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Lebih jauh, medan politik elektoral Indonesia kerap menjadi ruang utama bagi pertarungan modal. Kontestasi pemilu sering kali tidak hanya ditentukan oleh kekuatan visi dan program, tetapi oleh kemampuan aktor politik dalam mengelola jaringan patronase. Para kandidat membutuhkan dukungan dari tokoh lokal, pengusaha, organisasi massa, maupun kelompok masyarakat tertentu untuk memperluas basis pemilih. Sebaliknya, pihak-pihak yang memberikan dukungan memperoleh akses terhadap keuntungan politik dan ekonomi ketika patron mereka menduduki posisi kekuasaan. Pola relasi ini menunjukkan bagaimana modal sosial bekerja dalam logika pertukaran, sesuai dengan perspektif Bourdieu yang melihat modal sebagai mekanisme dominasi dalam arena sosial.

Patronase juga berperan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran daerah, distribusi bantuan sosial, hingga penempatan jabatan birokrasi sering kali dipengaruhi oleh relasi patron-klien. Hal ini memperkuat ketimpangan kekuasaan dan menciptakan bentuk-bentuk baru oligarki politik. Meskipun demokrasi Indonesia secara prosedural terus berkembang, praktik patronase berpotensi menghambat kualitas demokrasi substantif karena memperlemah akuntabilitas, memperbesar potensi korupsi, dan mengurangi ruang partisipasi masyarakat secara rasional.

Dengan menggunakan kerangka teori Pierre Bourdieu, analisis terhadap budaya patronase di Indonesia menjadi lebih komprehensif. Teori praktik sosial membantu mengungkap bahwa patronase bukan hanya praktik politik pragmatis, tetapi struktur sosial yang terus direproduksi melalui pertarungan modal dan internalisasi habitus politik. Kerangka ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana patronase bertahan melampaui perubahan institusional, serta bagaimana ia bertransformasi dalam demokrasi kontemporer. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana konsep habitus, modal sosial, modal simbolik, dan medan politik menurut Pierre Bourdieu dapat digunakan untuk membaca realitas patronase di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu menjelaskan karakter patronase secara fundamental serta memberikan gambaran mengenai tantangan bagi penguatan demokrasi di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian mengenai hubungan antara modal sosial dan praktik patronase dalam konteks politik Indonesia melalui perspektif Pierre Bourdieu, khususnya terkait peran habitus, modal, dan arena dalam memproduksi serta mereproduksi relasi patron klien. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan aktor politik untuk memahami struktur patronase dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi serta mengurangi praktik klientelisme di tingkat lokal.

Dari sisi akademik, penelitian ini menyediakan referensi ilmiah yang relevan bagi mahasiswa dan peneliti yang menekuni studi politik lokal, patronase, maupun teori praktik sosial Bourdieu, serta dapat menjadi model metodologis untuk penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Selain itu, penelitian ini memberi manfaat sosial dengan membantu masyarakat memahami mekanisme patronase yang bekerja melalui modal sosial, sehingga mampu mendorong peningkatan literasi politik, sikap politik yang lebih rasional, dan kesadaran kritis terhadap dinamika kekuasaan dalam kehidupan politik sehari-hari.

Oleh karenanya penelitian ini, memanfaatkan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang ditujukan dalam melangsungkan pengkajian budaya patronase di Indonesia melalui perspektif Pierre Bourdieu, khususnya terkait peran habitus, modal, dan arena dalam memproduksi serta mereproduksi relasi patron klien (Riza et al, 2024).

Sementara, alasan memilih metode semacam ini yaitu supaya paham mengenai fenomena yang diangkat peneliti sendiri dengan mewujudkan suatu deskripsi secara keseluruhan sebagaimana dilakukan penyajian melalui narasi maupun mewujudkan pelaporan perspektif yang spesifik dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah seperti bacaan jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun pemberitaan (Fadli, 2021).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Timbulnya Perkembangan Budaya Patronase di Indonesia**

Budaya patronase di Indonesia telah melenggang sejak era Kerajaan. Hal ini dibuktikan ketika saat kehadiran orang-orang Arab di Jawa pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Berdirinya Keraton Yogyakarta pada tahun 1755 M, terlihat kalangan bangsa Arab golongan Hadrami telah menjadi bagian dari keluarga Sultan Yogyakarta yang juga menjadi bukti bahwa mereka telah berkontribusi di Keraton Yogyakarta. Sejalan dengan itu ditemukan hal penting, yakni antara keluarga dari para sayyid dan putri bangsawan Jawa melakukan pernikahan sehingga membuat para sayyid kuat dalam posisi sebagai elit politik dan legitimasi

keagamaannya di Keraton Yogyakarta, sehingga menguatkan adanya pertukaran jasa dan aliansi di dalamnya. Tidak berselang lama para kalangan Arab membangun patronase politik sehingga menjadi antitesa bagi Keraton Yogyakarta, dalam bentuk perlawanan (Athoillah, 2019).

Pola patronase juga terjadi di era kolonialisasi, diawali dengan desa elemen politik mikro yang berbasis pada self government community tidak dapat dilepaskan dari pergolakan panjang globalisasi dan kapitalisme. Untuk menelaah fenomena tersebut, terdapat dua hal yang melatarbelakanginya, pertama, menyangkut sistem kolonialisme Belanda lamanya 350 tahun membangun paradigma sistem jajahannya dengan liberalisme dan kapitalisme. Kedua, patronase politik desa telah membentuk relasi pamong desa dan warga sebagai patron-klien termasuk implisit siasat politik hegemoni kolonialisme. Dalam hal ini, pamong desa melalui Revenue Constitution tahun 1814 bersekongkol dengan pemerintah kolonial dengan tujuan untuk mengambil upeti hasil perkebunan dan pajak tanah melalui sistem administratif (Fathudin, 2020). Perbedaan pola patronase yang terjadi dari masa pra kolonialisme hingga masa orde baru terlihat secara eksplisit. Pra kolonialisme pola patron-klien yang terjadi bersifat personal-asosiatif, sedangkan orde baru bersifat institusi birokratis (Leksana, 2019).

Orde Baru memainkan patronase sebagai sistem distribusi sumber daya oleh Suharto kepada pendukungnya, termasuk jabatan pemerintahan dan peluang bisnis menguntungkan, untuk memastikan loyalitas melalui Golkar yang mendominasi pemilu hingga tingkat desa. Sistem ini menciptakan jaringan patron-klien terpusat di keluarga Cendana, dengan kebijakan proteksionis yang mengikat akumulasi ekonomi pada koneksi politik dan lisensi proyek negara.

Menurut Shefter dalam Pratama (2017), patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi guna mendistribusikan sesuatu kepada calon pemilih dan juru kampanye, yang bertujuan untuk mendapatkan tujuan politik mereka. Maka bisa diartikan bahwa patronase merupakan pemberian barang, uang tunai, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang diberikan oleh politisi, termasuk keuntungan dalam segmentasi individu, yakni amplop berisi materil. Dan kelompok, yakni fasilitas umum untuk kegiatan pemuda. Patronase bisa saja mendistribusikan sesuatu berasal dari dana pribadi, misalnya untuk membeli suara atau *money politik* dan *vote buying*. Dan dana-dana publik, misalnya proyek pork barrel yang didanai oleh pemerintah. Patronase biasanya memiliki keterkaitan dengan klientisme. Klientisme adalah jaringan antara personalia yang memiliki hubungan sosial, politik dan ekonomi yang secara implisit mengandung elemen literasi, status inequality dan resiprokal (Aspinall & Berenschot, 2019). Namun ada perbedaan dalam karakteristik antara patronase dan klientisme. Patronase cenderung ada hubungan dua arah, antara patron dan klien dengan sekali

hubungan, sedangkan klientisme hubungan bisa berubah menjadi tiga arah yang mana patron mereduksi menjadi perantara dengan menjembatani klien mereka dengan komunitas eksternal (Pratama, 2017). Tentu saja patronase dan klientisme memiliki perbedaan signifikan dalam praktiknya.

Di Indonesia terdapat praktik patronase yang dilakukan oleh politisi, juga marak ketika sebelum memasuki masa-masa kontestasi pemilu, terkadang praktik patronase ini dilakukan oleh elit lokal. Elit lokal merupakan seseorang yang memiliki kedudukan sentral di daerah domisilinya seperti kepala desa, birokrat, pemuka agama, dan orang berpengaruh lainnya yang mana mereka biasanya memiliki pengaruh signifikan dalam bentuk memberikan petunjuk atau semacamnya terhadap masyarakat (Yanuaris, 2022). Dalam konteks politik, elit lokal atau kepala desa tentu diperhitungkan pengaruh kekuasaannya terkhusus dalam kajian patronase dan klientisme, kepala desa bisa saja memobilisasi masyarakatnya guna mendukung kandidat politik daerah, dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari kandidat politik daerah tersebut (As'ad & Aspinall, 2015).

Habitus patronase di Indonesia akan berpengaruh pada kualitas demokrasi, karena ketika memasuki masa-masa pemilu masyarakat akan bersikap skeptis dan berstigma buruk akan kualitas pemilu dan demokrasi yang diselenggarakan oleh negara (As'ad & Aspinall, 2015). Efek patronase memang ganas, seperti kanker yang menggerogoti sel-sel tubuh, ibarat patronase itu sendiri yang menggerogoti tubuh negara. Kanker patronase bukan hanya terjadi di lingkup tubuh masyarakat sipil saja, melainkan dalam tubuh birokrasi, akibatnya para birokrat bertindak tidak sesuai dengan AD/ART tetapi mengikuti kehendak politisi. Meluasnya politisasi birokrasi telah marak terjadi di Indonesia. Praktik ini menumbuhkan hubungan yang tidak sehat antara pejabat politik yang sedang berkuasa dan para birokrat. Politisi memanfaatkan struktur birokrasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, sementara birokrat bersedia terlibat dalam proses politisasi tersebut. Situasi ini menyebabkan birokrasi kehilangan efisiensi dan efektivitas, sementara nilai-nilai profesionalisme, keadilan, serta netralitas semakin tergerus. Bahkan hal ini berpengaruh pada layanan penerimaan calon ASN yang mana ada sirkulasi patron-klien antara birokrat dan politisi (Kusmana & Mustofa, 2024).

Implikasi siklus patronase bila diteruskan akan merusak sistem birokrat, maka perlunya komitmen politisi dan birokrasi untuk menghindari siklus patronase ini perlu ditanamkan, meskipun sulit. Implikasi kerusakan yang diakibatkan oleh patronase akan menysar ke sesuatu yang lebih besar lagi dan akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat dan alam. Kesejahteraan alam atau ekologi kiranya perlu dijadikan perhatian lebih oleh piranti pemangku kebijakan agar membuat aturan yang lebih tegas kepada pelaku kerusakan ekologi.

Hubungan antara ekologis dan jaringan patronase hanya menjadi ekologis sebagai sasaran untuk mempermudah jaringan patronase yang menjadikannya sebagai daya tawar. Jaringan patronase yang dimaksud ialah antara aktor politik dengan para pebisnis. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Lumbu, Kalimantan Selatan. Terlihat bahwa sumber daya tambang batubara menjadi tumbal persekongkolan antara aktor politik dan aktor bisnis pertambangan guna membangun jaringan patronase politik dan bisnis. Jaringan patronase yang terstruktur berimplikasi pada Pilkada yang berlangsung. Hal ini imbas dari praktik demokrasi yang terjadi pasca reformasi, yakni memberikan ruang aktor bisnis untuk berpolitik (As'ad et al., 2023). Selain itu, di Malang Selatan, Jawa Timur, terdapat dinamika perdesaan dikuasai pola patronase, hingga mengintervensi kebijakan-kebijakan agraria yang kemudian menysasar kelompok tertentu saja di desa. Praktik patronase di sana tetap bertahan meski telah terjadi reformasi pemerintahan, sesampainya kekerasan yang terjadi dalam restorasi rezim tidak mengubah relasi patron di tingkat desa, malahan memperkuat aliansi-aliansi patronase baru. Harusnya kebijakan agraria yang diambil saat pasca reformasi mengamati pola hubungan kuasa, sehingga adagium "siapa mendapat apa" layak diutamakan oleh para aktivis studi agraria dan piranti pemangku kebijakan (Leksana, 2019).

Struktur masyarakat yang rentan terkena akan serangan patron ialah struktur masyarakat berpenghasilan rendah, dalam konteks ini masyarakat miskin. Mereka menjadi sasaran empuk patronisme dan tak segan-segan menjadikan sebagai klien mereka untuk melanggengkan kepentingan. Mereka terbatas akan informasi pengetahuan politik dan mekanisme demokrasi sering di kontrol dan dibatasi oleh kekuasaan elit politik. Elit tersebut menawarkan dalam bentuk program kerja yang menghasilkan materil (Haliim & Fatkhurrohman, 2025). Sebagaimana Foucault yang menjelaskan bahwa kekuasaan akan membentuk definisi pengetahuan, dan pengetahuan untuk kekuatan (Sexualite, t.t.).

Budaya patronase di Indonesia menunjukkan pola historis yang panjang dan terus bereproduksi dari masa pra-kolonial, kolonial, orde baru, hingga era demokrasi kontemporer. Patronase tidak hanya berakar pada relasi feodal dan struktur sosial kerajaan, tetapi juga diperkuat oleh kolonialisme, kapitalisme, dan konfigurasi politik modern. Relasi patron-klien yang semula bersifat personal-asosiatif berkembang menjadi jaringan yang semakin kompleks dan terinstitusionalisasi, terutama pada masa orde baru ketika patronase dipadukan dengan kontrol politik yang terpusat melalui Golkar dan birokrasi negara.

Dalam perkembangan demokrasi pasca-Reformasi, patronase tidak surut, tetapi justru menemukan bentuk-bentuk baru yang melibatkan elite lokal, birokrat, politisi, dan bahkan aktor bisnis. Praktik patronase dalam kontestasi elektoral meliputi pembagian uang, jasa,

proyek, dan fasilitas publik menandakan bahwa demokrasi masih berjalan dengan logika pertukaran material dan loyalitas personal. Perbedaan patronase dan klientelisme dalam konteks politik Indonesia memperlihatkan pola-pola relasi kekuasaan yang dinamis, di mana jaringan patron tidak hanya menghubungkan patron dan klien, tetapi juga melibatkan mediator yang memfasilitasi kepentingan politik dan ekonomi.

Budaya patronase terbukti membawa konsekuensi serius terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan. Politisasi birokrasi, kooptasi jabatan publik, intervensi elite dalam perekrutan ASN, serta ketergantungan birokrat pada politisi menunjukkan bahwa patronase telah menggerogoti profesionalisme lembaga negara. Dampaknya tidak hanya menghambat efektivitas birokrasi, tetapi juga memperkuat ketimpangan kekuasaan dan merusak mekanisme *check and balance*. Dalam banyak kasus, patronase bahkan memengaruhi kebijakan yang merugikan lingkungan, seperti kolusi aktor politik dan aktor bisnis dalam proyek tambang maupun agraria, yang menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas dalam jaringan patronase.

Di tingkat masyarakat, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terkooptasi patronase karena keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan politik, dan sumber daya ekonomi. Ketergantungan mereka pada patron menciptakan siklus subordinasi yang memperkuat dominasi elite dan melemahkan partisipasi politik yang deliberatif. Hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan dominasi sebagaimana dijelaskan oleh Foucault tercermin jelas dalam fenomena ini.

Secara keseluruhan, budaya patronase di Indonesia bukan sekadar praktik politik sesaat, tetapi struktur sosial yang berakar dalam sejarah panjang dan terus direproduksi melalui relasi kekuasaan, ekonomi, dan simbolik. Patronase merusak pondasi demokrasi substantif, menghambat reformasi birokrasi, memperkuat oligarki lokal maupun nasional, dan berdampak pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tanpa perubahan mendasar pada relasi kekuasaan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan kapasitas politik masyarakat, patronase akan tetap menjadi salah satu hambatan utama bagi konsolidasi demokrasi dan tata kelola publik yang adil di Indonesia (Rohma, 2023).

### **Wujud Kehadiran Medan Politik dan Modal Sosial sebagai Suatu Kebutuhan Para Aktor Politik di Indonesia**

Berdasarkan refleksi budaya patronase yang ada di Indonesia, terlihat bahwa kepentingan politik didominasi oleh para aktor dengan pelbagai modal yang dimilikinya, baik modal dalam bentuk akumulasi kekuasaan politik, sosial, kultural, dan pertambangan. Dominasi elit politik yang telah memiliki modal tersebut akan membentuk siklus patronase



yang akan mengarah kepada proyeksi *sustainability*. Imbas bagi masyarakat sipil yang tidak memiliki kuasa literasi politik dan ekonomi yang kuat akan dijadikan sebagai klien utama mereka untuk memuluskan kepentingannya. Dewasa ini jaringan antara aktor politik dan pebisnis semakin menggurita, mirisnya ketika bersekongkol pada pebisnis pertambangan.

Namun, jika diteruskan tidak selamanya itu berjalan baik, sistem demokrasi yang dimiliki Indonesia hanya akan dijadikan lahan akumulasi kepentingan politik untuk mewujudkan pola patron-klien. Efek akan mengguritanya budaya patronisme ternyata telah terjadi sejak era pra kolonialisme hingga pasca reformasi, begitu sudah menjadi mata rantai yang mengikat erat. Memang sulit untuk memutus mata rantai tersebut, apalagi jika sudah memasuki ruang-ruang birokrasi.

Aktor-aktor politik memiliki medan politik dan modal sosial tersendiri, hingga pola patronisme akan terakumulasi menjadi klientisme. Fenomena di atas mengelaborasi bahwa medan politik dan modal sosial menjadi kebutuhan paling signifikan bagi aktor politik untuk mengakumulasi kepentingan politiknya. Untuk mengetahui segmentasi apa saja yang menjadi medan politik dan modal sosial akibat dari praktik patronase, penelitian ini menggunakan kajian Teori Praktik Sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bordieu, dalam kajiannya menyebutkan ada tiga struktur dalam membentuk struktur sosial, yakni habitus, modal, dan arena, hingga membentuk praktik sosial. Atau bisa dirumuskan menjadi  $(\text{habitus} \times \text{modal}) + \text{arena} = \text{praktik sosial}$ . Secara historis, munculnya pemikiran Bordieu terpengaruh oleh filsafat eksistensialisme Jean Paul Sartre. Dan munculnya teori ini akibat hasil dari alam pikiran Bordieu yang mencoba untuk menyelesaikan pertentangan objektivisme vs subjektivisme, mikro vs makro, individu vs masyarakat, agen vs struktur sosial, *nature vs history*, kebebasan vs determinisme, material vs simbolis untuk menjelaskan praktik sosial (Muhammad et al, 2023).

Segmentasi budaya patronase di Indonesia bisa dibedah melalui tinjauan kembali secara esensial terkait struktur habitus, modal, dan arena seperti penjelasan di bawah ini:

### ***Habitus***

Habitus merupakan hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial yang diinternalisasikan, dalam diskursus dialektika. Atau merupakan agen yang bertindak dengan kesadaran yang disebabkan oleh kebiasaan yang dijalani oleh agen, dan dapat ditinjau dari pola fisiologis mereka, seperti cara mereka berjalan, meludah, makan, dan berbicara (Addina et al, 2025). Habitus berfungsi sangat baik dengan sistem, struktur, hukum, aturan, dan juga kategori pemaknaan di kehidupan sehari-hari (Wirawan, 2012). Dalam konteks patronase, habitus atau kebiasaan politisi di Indonesia masih melakukan pola *money* politik dengan biaya pribadi untuk

mengondisikan suara dengan menjadikan klien (tim sukses + masyarakat) sebagai jaringan resiprokal. Artinya strukturasi jaringan terkonsep secara terstruktur oleh patron (aktor politik) dan klien (tim sukses + masyarakat) dengan berorientasi pada kemenangan kontestasi pemilihan umum, habitus ini juga menghegemoni masyarakat akan terbiasa dengan *money* politik (Setiawan, 2022). Secara eksplisit habitus seseorang aktor politik bisa dinilai oleh masyarakat dengan anggapan bahwa *money* politik merupakan aktivitas yang wajar dilakukan oleh politisi ketika kampanye. Sejalan dengan itu Menurut Bordieu dalam habitus struktur bisa membentuk keadaan sosial, dan keadaan sosial bisa membentuk struktur (Lagabuana et al., 2021).

Habitus patronase ini telah mengakar dalam tiap dekade pemerintahan, dalam hal ini seperti pemerintahan daerah. Jonny Ricardo Kocu menjelaskan studi kasus di Kabupaten Maybart, Provinsi Papua Barat dari sejak tahun 2017 terdapat praktik patronase yang mana kepala desa dipilih oleh kepala daerah secara langsung tanpa melewati proses demokratisasi, yakni pemilihan umum desa. Alhasil kualitas dan praktik demokrasi mengalami degradasi. Adanya pemilihan dengan sistem sentralisasi melalui kepala daerah disebabkan oleh hasil kemenangan Pilkada pada tahun 2017 (Hilmawan, 2019). Struktur ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat daerah yang melemahkan proses demokratisasi lokal. Padahal proses demokratisasi lokal merupakan hulu masyarakat untuk memahami demokrasi beserta prosesnya.

### ***Modal (Ekonomi, Budaya, dan Sosial)***

Modal di sini merupakan terusan dari habitus, yakni habitus dipengaruhi modal ekonomi, budaya, dan sosial (Wirawan, 2012). Studi kasus akan aktor politik menggunakan ketiga modal tersebut telah menjadi katalisator untuk melanggengkan patronase:

Pertama, sektor modal ekonomi, mereka menggunakan kuasa ekonomi melalui sumber daya alam, misal aktor politik bersekongkol dengan pengusaha ekstratif pertambangan, hasil dari ekstratif tersebut acap kali digunakan untuk membangun jaringan dengan klien, artinya sumber ekonomi patron dihasilkan dari hubungan mereka dengan pengusaha ekstratif (As'ad et al., 2023). Kekuatan ekonomi yang selalu diperhitungkan bisa menjadi bumerang akan hadirnya sistem meritokrasi, karena para patron berlomba-lomba untuk menghasilkan sumber kekuatan ekonomi sebanyak-banyaknya hingga berimplikasi minimnya ruang meritokrasi, dalam hal ini mereka tidak mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas, tetapi hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Sulit dipungkiri bahwa patronase akibat dari mahalnya biaya politik (Rosyan & Prasojo, 2024). Patron yang memiliki kekuatan ekonomi memiliki kuasa besar untuk mengarahkan masyarakatnya sebagai klien untuk memilih sebuah

calon politik, seperti studi kasus pada terpilihnya HJ. Marniwati sebagai kades di Desa Jojjolo Kabupaten Bulukumba. Tokoh masyarakat sebagai patron umumnya memiliki sumber daya ekonomi serta keterampilan yang dibutuhkan oleh komunitas petani sebagai klien. Kondisi tersebut menempatkan patron sebagai figur yang dianggap mampu memberikan dukungan yang signifikan bagi para klien. Sebagai konsekuensinya, para klien merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan dan kemudian menunjukkan bentuk balasan melalui loyalitas maupun pengabdian terhadap kepentingan patron untuk memenangkan HJ. Marniwati (Ramli, 2016).

Kedua, sektor modal budaya, menurut Bordieu kebudayaan berfungsi sebagai arena kekuatan simbolik yang dimanfaatkan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan posisi sosialnya. Dominasi tersebut direproduksi melalui modal budaya meliputi pengetahuan, preferensi, dan kualifikasi yang terinternalisasi dalam bentuk habitus sebagai disposisi tidak disadari. Proses ini menghasilkan stratifikasi sosial, di mana selera yang dianggap bernilai, khususnya selera kelas atas, menjadi instrumen eksklusi sekaligus mekanisme reproduksi ketimpangan.

Dengan demikian, selera bukan hanya ekspresi estetika individual, melainkan juga sumber daya yang memiliki nilai pertukaran layaknya modal ekonomi (Wirawan, 2012). Seperti di Struktur sosial Madura pada masa pemerintahan pribumi menunjukkan pembagian yang tegas antara kelas penguasa sebagai patron dan kelas petani sebagai klien. Kelas penguasa memegang otoritas penuh atas sumber daya ekonomi dan politik, sementara kelas petani menyediakan tenaga kerja bagi patron. Relasi keduanya dipertautkan melalui mekanisme upeti seperti *percaton*, *apanage*, dan *daleman*. Dalam perkembangannya, pola patronase ini mengalami perluasan dan menjadi lebih erat, meliputi dimensi ekonomi dan politik. Dukungan masyarakat Madura terhadap Trunojoyo dalam perlawanan terhadap hegemoni Mataram mencerminkan kekuatan jaringan patronase tersebut. Pada masa kini, pola relasi serupa tampak dalam hubungan antara kepala desa sebagai pemilik *percaton* dengan aparat desa dan masyarakat sebagai pengelola, serta dalam hubungan pemilik kapal dengan pandega di sektor perikanan. Relasi-relasi ini umumnya menghasilkan hubungan yang bersifat personal dan berkelanjutan (Hefni, 2009).

Ketiga, sektor modal sosial, merupakan struktur sosial yang terikat secara ketat dengan memiliki aturan dan sanksi yang jelas sehingga masyarakat di dalamnya memiliki kepastian dalam bertindak satu sama lain (Rajab, 2024). Dalam hal ini aktor politik biasanya memegang jaringan struktur sosial di pelbagai geografis wilayah di Indonesia dengan kondisi, terkadang mereka membangun jaringan dengan elit desa, seperti memantau basis ekonomi tokoh sentral dan lembaga politik desa, hal ini menunjukkan bagaimana struktur elit desa utamanya sebagai

petani kapitalis atau tuan tanah kemudian kekuasaannya terletak di penguasaan tanah dan komoditas pertanian. Implikasi politiknya, proyek pembangunan di desa menguntungkan tuan tanah ibarat sebagai “hadiah” (*A Prize for the Village Ruling Class*, t.t.). Hasil akan menggunakan modal sosial sebagai tujuan untuk mengakumulasi kepentingan patron memiliki implikasi yang begitu besar terhadap sistem politik yang ada di daerah, tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan kekuasaan.

### ***Arena (Medan Politik)***

Menurut Bourdieu, arena atau ranah merupakan ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah fungsinya sendiri dengan relasi-relasi kekuasaannya sendiri yang terlepas dari kaidah politik dan kaidah ekonomi (Wirawan, 2012). Di dalamnya termaktub upaya-upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya dalam bentuk modal dan juga usaha untuk memperoleh akses kekuasaan. Aspinall dan Berenschot menyebutkan bahwa praktik klientisme, peran pialang politik, serta bagaimana pertukaran material menjadi instrumen politik telah dilakukan di Indonesia oleh elit politik sejak lama (Aspinall & Berenschot, 2019). Medan politik di skala demokrasi lokal atau pedesaan menjadi hal yang paling kuat terjadinya praktik patronase, elit lokal atau kepala desa diperhitungkan pengaruh kekuasaannya mereka bisa memobilisasi masyarakatnya guna mendukung kandidat politik daerah, dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari kandidat politik daerah tersebut (As'ad & Aspinall, 2015). Secara umum bisa diartikan bahwa konteks akan medan politik yang ada di Indonesia bisa terjadi di struktur wilayah mana saja, namun yang paling riskan terjadi ialah di daerah pedesaan karena adanya elit lokal yang berkuasa dan mereka terkadang melakukan *pork barrel* sebagai upaya untuk memperkuat medan politik yang ditujukan kepada masyarakat sekitar.

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa praktik patronase dalam politik Indonesia terbentuk melalui interaksi antara habitus, modal, dan arena sebagaimana dirumuskan dalam Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Habitus politik yang telah lama terbentuk seperti normalisasi money politics dan relasi patron-klien menciptakan pola tindakan yang repetitif dan diterima sebagai kewajaran. Praktik ini kemudian diperkuat oleh modal ekonomi, budaya, dan sosial yang dimiliki aktor politik, sehingga patron mampu mempertahankan dominasi dan memobilisasi dukungan melalui sumber daya yang mereka kuasai. Pada akhirnya, arena politik, terutama di level lokal dan pedesaan, menjadi ruang paling subur bagi reproduksi patronase karena keberadaan elite lokal yang memiliki kekuatan simbolik dan material untuk memengaruhi masyarakat. Secara keseluruhan, patronase berkembang menjadi klientalisme yang terlembaga dan melemahkan prinsip demokrasi, sebab struktur habitus, modal, dan arena saling menopang dalam melanggengkan ketimpangan relasi kekuasaan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Budaya patronase di Indonesia merupakan fenomena sosial-politik yang berakar panjang sejak era pra-kolonial, kolonial, orde baru, hingga demokrasi kontemporer. Dengan menggunakan kerangka teori praktik sosial Pierre Bourdieu habitus, modal, dan arena dapat dipahami bahwa patronase bukan sekadar praktik politik transaksional, melainkan struktur sosial yang terus diproduksi dan direproduksi melalui mekanisme historis, ekonomi, sosial, dan simbolik.

Habitus politik masyarakat yang terbentuk dalam relasi feodal serta pengalaman demokrasi yang pragmatis menjadikan praktik patronase sebagai sesuatu yang dianggap wajar dalam kontestasi elektoral dan hubungan kekuasaan. Modal ekonomi, budaya, dan sosial yang dimiliki aktor politik memperkuat kemampuan mereka untuk memobilisasi dukungan dan membangun jaringan patron–klien yang menguntungkan.

Arena politik, terutama pada tingkat lokal dan pedesaan, menjadi ruang paling subur bagi reproduksi patronase karena kuatnya posisi elite lokal sebagai pemilik modal simbolik dan material. Patronase memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas demokrasi. Politisasi birokrasi, kooptasi jabatan publik, pengaruh aktor bisnis dalam kebijakan publik, hingga eksploitasi sumber daya alam mencerminkan bagaimana patronase menggerogoti prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di tingkat masyarakat, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan literasi politik dan ketergantungan ekonomi. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa patronase tidak hanya menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial serta memperlambat terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam di tingkat lokal guna memahami variasi praktik patronase berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik di berbagai daerah. Integrasi teori praktik sosial Pierre Bourdieu dengan pendekatan lain seperti ekonomi politik, teori jaringan kekuasaan, maupun kajian perilaku pemilih dapat memperkaya analisis terhadap dinamika patron-klien dalam demokrasi kontemporer. Selain itu, diperlukan penelitian yang menelaah secara khusus peran birokrasi dalam mempertahankan siklus patronase, terutama melalui politisasi jabatan publik, rekrutmen ASN, dan distribusi program pemerintah. Kajian mengenai keterlibatan aktor bisnis dalam membentuk jaringan kekuasaan, baik di sektor pertambangan maupun agraria, juga penting untuk diperluas. Di sisi lain, penelitian tentang literasi politik masyarakat miskin dan potensi resistensi sosial menjadi urgensi akademik mengingat kelompok tersebut sering menjadi sasaran patronase. Mengingat perkembangan teknologi politik, penelitian mengenai patronase

digital melalui media sosial dan *influencer* politik perlu dikembangkan sebagai bentuk baru relasi patron-klien. Terakhir, penelitian evaluatif terhadap kebijakan mitigasi patronase seperti transparansi anggaran, penguatan pengawasan pemilu, dan reformasi tata kelola desa perlu dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan kekuasaan: Antara pembebasan dan dominasi perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196–210. <https://doi.org/10.31004/fdswm377>
- Afrilian, A. H., Saepudin, E. A., Ramadhani, I., Aqila, A. N., & Nurhasna, F. (2025). Kebijakan pemberantasan korupsi terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta efek pada pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3942–3952. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3383>
- Ahmad Athoillah, A. (2019). *Patronase politik di keraton Yogyakarta abad XIX*. Universitas Indonesia Library; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- As'ad, M. U., & Aspinall, E. (2015). The patronage patchwork: Village brokerage networks and the power of the state in an Indonesian election. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 171(2–3), 165–195. <https://doi.org/10.1163/22134379-17102004>
- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan jaringan patronase: Dinamika kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, N. K. D. F. Y. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 26–35. A prize for the village ruling class: “Village funds” and class dynamics in rural Indonesia. (n.d.).
- Endang, M., Suyuti, N., & Husain, N. (2025). *Demokrasi yang terjual: Klientelisme-kuasa & politik patronase dalam demokrasi elektoral*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajar Lagabuana, B., Sukri, S., & Haryanto, H. (2021). Bertahan dan menang: Strategi dan modal politik Sri Rahmi dalam pemilihan legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Transformative*, 7(2), 157–173. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.1>
- Haliim, W., & Fatkhurrohman, M. (2025). Relasi kuasa dan klientelisme pada budaya politik masyarakat miskin Indonesia: Studi implementasi program keluarga harapan (PKH). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(4), 688–705. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5965>

- Hefni, M. (2009). Patron-client relationship pada masyarakat Madura. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 15–24. <https://doi.org/10.19105/karsa.v15i1.110>
- Hilmawan, T. (2019). *Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2022*.
- I.B.Wirawan, P. D. (2012). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma: Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi di bawah bayang-bayang patronase-klientelisme: Memitigasi praktik politisasi birokrasi di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v6i1.11389>
- Leksana, G. (2019). Ketimpangan dan kontinuitas patronase dalam lintasan sejarah: Menelusuri sejarah perubahan agraria di Malang Selatan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 5(1), 54–68. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.319>
- Michel Foucault. *Histoire de la sexualité* (n.d.). Retrieved December 10, 2025, from
- Peneliti, T. (n.d.). Patronase, klientelisme dan politik identitas dalam perhelatan demokrasi akar rumput.
- Pratama, R. A. (n.d.). Patronase dan klientelisme pada pilkada serentak Kota Kendari tahun 2017.
- Riza, R. M., Imronudin, I., & Fatchiatuzzahro, F. (2024). Analisis habitus dan kapital Khawārij perspektif Pierre Bourdieu dalam strategi kekuasaan. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(2), 270–291. <https://doi.org/10.24090/maghza.v9i2.11317>
- Rohmah, E. I. (2023). Praktik patronase dalam pemilu dan implikasinya terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1), 91–111. <https://doi.org/10.14421/nn2y2916>
- Rosyan, A. N., & Prasojo, E. (2024). Pemilihan umum dan budaya patronase: Mahalnya biaya politik di tengah berkembangnya sistem meritokrasi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>
- Sakti, F. T. (2025). Dinasti politik dan penempatan birokrasi: Implikasi terhadap kinerja pemerintahan di Indonesia. *Distingsi: Journal of Digital Society*, 4(1), 1–9.
- Setiawan, I. (2022). Patronase dan klientelisme politik (Studi pada masyarakat daerah pemilihan I, Kabupaten Bangka di pemilihan legislatif 2019). 1(6).
- Urfan, N. F., Arisanto, P. T., Wibawa, A., & Karim, A. M. (2024). Paradigma dasar dalam kajian ilmu sosial. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 231–238. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.150>
- Yanuaris, V. (2022). Politik patronase sebagai tantangan demokrasi di Indonesia dan cendekiawan sebagai gerakan alternatif (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Zainal, A., Zainal, M. A., Rafiah, W. A., & Kina, W. K. W. (2021). Relasi kekerabatan patronase masyarakat Muna. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27–42. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2794>